

DARI PREMANISME KE BOSS-ISME

*Sarlito Wirawan Sarwono**

ABSTRAK

Sejak krisis moneter pada Juli 1997, yang diikuti dengan krisis ekonomi, politik dan sosial, Indonesia mengalami perubahan struktur kemasyarakatan yang drastis, yang dikenal dengan istilah "Reformasi". Idealisme atau cita-cita Reformasi adalah perubahan dan Tirani ke Demokrasi. Tetapi dalam kenyataannya, yang terjadi adalah anarki. Buntut dari anarki adalah berkembangnya boss-boss kecil di segala lapisan masyarakat, seperti yang pernah dan masih terjadi di Philipina, yang intinya tidak lain adalah hedonisme dan kekerasan. Gejala ini coba dijelaskan melalui beberapa teori psikologi sosial, namun bagaimanapun, proses ini harus dan sedang dilalui oleh bangsa Indonesia dan dibutuhkan waktu cukup lama sebelum bangsa ini sampai kepada sistem demokrasi yang mapan. Dalam hubungan ini peran Polri sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mempercepat proses menuju demokrasi (masyarakat madani) di negeri ini dan mencegah eksese yang tidak dikehendaki.

Krisis moneter pada tahun 1997, yang melanda negara-negara Asia Tenggara, tidak dimulai dari Indonesia, melainkan dari Muangthai, disusul oleh Malaysia, Philipina dan

baru ke Indonesia, sedangkan Singapura bisa dikatakan tidak tersentuh sama sekali oleh krisis tersebut. Namun ketika negara-negara lainnya mulai bangkit lagi dari krisisnya, Indonesia tetap terpuruk, bahkan berlanjut dengan krisis ekonomi, politik dan sosial. Dolar AS (US\$) yang sebelum krisis bernilai Rp. 2.500,- melonjak hingga pernah mencapai Rp.

* Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) dan Program KIK PPS UI (Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia).
E-mail: sarwono@makara.cso.ui.ac.id

15.000,- per US\$ (kemudian turun menjadi Rp. 7.000,- dan pada saat artikel ini ditulis kursnya adalah sekitar Rp. 9.000,- per US\$). Pendapatan perkapita pertahun, yang di atas US\$ 1.000,- sebelum krisis, sekarang menjadi kurang dari US\$ 300,-. Angka pertumbuhan dari 7% turun drastis ke-12% (sekarang sudah meningkat lagi ke 2%) dan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan melonjak dan 10% ke 40%. Manifestasinya dalam politik adalah jatuhnya Presiden Suharto oleh aksi-aksi massa, yang disusul dengan era Presiden Habibie, pemilihan umum 1999 dan terpilihnya pasangan Abdurachman Wahid-Megawati sebagai presiden dan wakil presiden RI melalui sidang MPR 1999.

Sementara itu, struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara dan instansi-instansi pemerintah berubah cukup drastis. Lembaga kepresidenan tidak kebal lagi terhadap kritik terbuka, DPR dan MPR mempunyai peran yang jauh lebih besar, bahkan bisa langsung mengintervensi pemerintah (baik di tingkat pusat, maupun di daerah); presiden bisa dituntut mundur dan MPR dituntut untuk melakukan Sidang Istimewa; hubungan pusat-daerah tidak lagi sentralistik dan berubah menjadi otonomi daerah; Polri keluar dari ABRI dan menjadi aparat

penegak hukum dengan status non-militer; ABRI sendiri berubah menjadi TNI dan dikurangi peran sosial politiknya (dikenal dengan istilah "Dwi-fungsi ABRI") dan sebagainya.

Tetapi yang terpenting dari semuanya adalah terbukanya peluang untuk masyarakat (dari organisasi-organisasi kemasyarakatan tingkat pusat, LSM, sampai ke tingkat individu yang paling bawah) untuk mengintervensi langsung semua proses pembuatan keputusan dalam bidang sosial maupun politik yang secara formal dijalankan oleh lembaga-lembaga negara. Dengan didukung oleh media massa (yang memperoleh kebebasan pers sejak dicabutnya sensor pers dalam masa pemerintahan Habibie), masyarakat bisa memperoleh berbagai informasi tanpa disaring sama sekali dan sesudahnya bisa melakukan berbagai tindakan juga tanpa disaring sama sekali, yang berwujud pada berbagai aksi massa seperti unjuk rasa, pemogokan, pendudukan, penjarahan, penekanan, main hakim sendiri, pengadilan rakyat, terorisme dsb., yang semuanya mengatas-namakan "rakyat" (walaupun sudah menjadi rahasia umum bahwa seringkali terdapat permainan politik-uang di balik aksi-aksi massa tsb.).

Nyata sekali bahwa yang terjadi adalah anarki,

padahal tujuan Reformasi yang sesungguhnya adalah demokrasi (beberapa orang menyebutnya "masyarakat Madani").

Dari Tirani ke Anarki

Dalam psikologi-sosial terdapat berbagai teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya anarki. Salah satunya adalah teorinya Emile Durkheim (1897, dalam Fromm, 2000: 143) yang menyatakan bahwa manusia membutuhkan sistem sosial di mana ia memiliki tempat tinggal dan di mana hubungan dengan sesamanya relatif stabil, didukung oleh nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang diterima secara umum. Jika tradisi, nilai-nilai sosial dan keterikatan sosial dengan sesama menghilang (seperti pada masyarakat industri atau masyarakat modern), terjadilah situasi yang dinamakannya "anomie". Keadaan anomie ini akan menyebabkan perasaan terisolasi luar biasa pada diri individu-individu anggota masyarakat yang pada gilirannya akan memicu agresivitas, baik pada diri sendiri (bunuh diri), maupun pada orang lain yang salah satu bentuknya adalah agresi dan anarkisme.

Berbeda dari teori-teori tentang agresivitas massa yang lain, teori anomie dari Durkheim ini mampu menjelaskan

mengapa anarki tidak terjadi pada situasi-situasi yang menurut teori-teori lainnya berpotensi untuk memicu rusuh massa seperti Kibutz-kibutz (komunitas) di Israel yang penuh sesak dan kumuh; di Manhattan, New York, yang padat manusia; atau di Bombay yang berjejal dan sekaligus miskin.

Di Pulau Jawa, yang merupakan salah satu pulau terpadat di dunia, juga tidak terjadi anarki sampai datangnya reformasi. Ini berarti bahwa reformasi (yang memang bertujuan untuk merombak sistem yang lama) yang tidak diikuti dengan penataan sistem baru secara cepat dan efektif (karena elit politiknya bertikai terus), telah menimbulkan anomie dan pada gilirannya menyebabkan anarki.

Teori lain yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan anarkisme adalah teori-teori yang lebih berorientasi kepada psikologi (perilaku individual) dan tidak menekankan pada paradigma sosiologi seperti yang dikemukakan oleh Durkheim tsb. di atas. Salah satunya adalah dari Alfred Bandura tentang proses belajar sosial (1977, 1986, dalam Sarwono, 1999: 70-72). Dikatakan oleh Bandura bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk meniru model yang ingin dicontohnya (pada anak kecil kecenderungan ini justru diperlukan untuk perkembangan

kepribadiannya, tetapi pada orang dewasa bisa mengganggu hubungan antar-manusia). Maka ketika massa di papan bawah menyaksikan para elit politiknya bertikai terus, mereka pun akan menirunya sebab mereka mengira itulah yang terbaik untuk dilakukan.

Teori berparadigma psikologi lainnya, khususnya psikoanalisis, adalah yang dikemukakan oleh William Schutz (1955, 1958, dalam Sarwono, 1999: 63). Ia mengatakan bahwa disadari atau tidak, manusia mempunyai 3 macam kebutuhan dasar dalam hubungan antar pribadinya, yaitu: kebutuhan akan (1) situasi yang terkendali (kontrol), (2) keterlibatan dengan lingkungan sosialnya (inklusi) dan (3) perhatian serta kasih sayang dari orang lain (afeksi). Jika kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka orang akan berperilaku menyimpang, yaitu berperilaku berlebihan, atau justru sangat kurang berperilaku untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar tsb. Bila hal yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kontrol, reaksi yang timbul adalah kecenderungan untuk pasrah, atau justru ingin mengambil alih kendali ke tangannya sendiri. Jika kebanyakan orang memilih pilihan yang terakhir ini, akan terjadilah anarki, di mana setiap orang merasa

benar sendiri dan maunya menang sendiri.

DARI ANARKI KE BOSS-ISME

Dalam penelitian Sidel (1999), yang dilakukan dengan metoda analisis historis, dilaporkan bahwa di Philipina, diberlakukannya demokratisasi pada lembaga-lembaga formalnya, yang diikuti oleh kapitalisme (sebagai dampak kolonialisme Amerika Serikat), menyebabkan tumbuhnya fenomena *boss-isme*.

Boss-isme adalah bertumbuhnya *boss-boss* besar dan kecil di berbagai daerah, di mana setiap *boss* mempunyai kekuasaan monopolistik dalam bidang ekonomi dan politik yang dipertahankannya dengan mengerahkan pengikut-pengikut yang setia, yang setiap saat mau menjalankan perintah *boss* untuk menekan masyarakat atau pihak-pihak lain. Para *boss* ini, di Philipina adalah para elit politik turun-temurun (*political clans*) dan para jagoan (*warlords*) di setiap propinsi.

Sebagai dampak dari boss-isme ini terlihat di mana-mana kompleks-kompleks perumahan, perkebunan atau industri yang dijaga oleh pengawal-pengawal bersenjata, dan dari waktu ke waktu dapat disaksikan kejadian saling

bunuh antara pengawal dari seorang *boss* dan *boss* lainnya. Fenomena ini, menurut Sidel, timbul karena demokrasi dan kapitalisme diberlakukan di Philipina pada saat rakyat Philipina belum siap menerimanya.

Sudah barang tentu tidak tertutup kemungkinan bahwa gejala anarki yang sudah terjadi di Indonesia akan berkembang menjadi fenomena *boss-isme*. Para elit politik dan jagoan-jagoan lokal, saat ini pun sudah mulai nampak saling berebut pengaruh dan karenanya pertikaian-pertikaian sangat sulit dihentikan. Sasaran akhir dari persaingan dan pertikaian yang seringkali dikemas dengan isu-isu etnik dan/atau agama itu adalah perebutan sumber-sumber perekonomian lokal. Pihak yang terkuat akan keluar sebagai pemenang dan pada saat itu mereka akan menjadi *boss-boss* yang akan menguasai sumber-sumber perekonomian dan menentukan hajat hidup orang banyak di wilayahnya masing-masing. Pemerintah dan aparatnya hanya akan menjadi pelengkap yang perannya hanyalah mengukuhkan kemauan-kemauan para *boss* tsb. Kalau keadaan ini terjadi di Indonesia, maka sulit bagi negara ini untuk kembali ke alam demokrasi seperti yang dicita-citakan oleh para pejuang reformasi.

PERAN POLRI

Dalam setiap masyarakat demokratis, selalu ada kecenderungan untuk perubahan ke arah tirani, atau anarki. Dua arah perubahan yang saling bertentangan itu merupakan alternatif dari kondisi demokrasi yang tidak terbina dengan baik, karena bagaimanapun juga kecenderungan untuk mengontrol lingkungan terdapat pada setiap diri individu anggota masyarakat. Ketika ada satu orang saja yang bisa mengumpulkan semua kekuasaan di tangannya sendiri, maka terjadilah tirani, sedangkan jika semua orang berusaha memaksakan kehendak, terjadilah anarki. *Boss-isme* terjadi jika beberapa orang tertentu melaksanakan tirani di wilayah kekuasaannya masing-masing.

Untuk menghindari itu dan tetap berada dalam iklim demokrasi, peran polisi sangat penting. Salah satu fungsi polisi adalah mengendalikan situasi dan menjaga konformitas dalam masyarakat (Yarmey, 1990). Masyarakat dengan aparat kepolisiannya yang berfungsi baik, akan lebih mampu untuk mempertahankan situasi yang seimbang daripada jika aparat kepolisiannya memihak atau lebih mementingkan dirinya sendiri.

Menyadari hal itu, maka sejak lama masyarakat

menciptakan aparat kepolisian. Sebagian masyarakat (antara lain di Inggris), mengawali lembaga kepolisian dari *kin Police* (yang dibentuk oleh masyarakat sendiri), sedangkan sebagian lainnya (misalnya: Jepang) dimulai dari *Ruler Appointed Police* (dibentuk oleh penguasa-pemerintah). Sekarang, hampir semua negara mempunyai polisi yang dibentuk pemerintah, akan tetapi beberapa negara (Inggris, Amerika) mempunyai keduanya (Koenarto, 1997: 215-216).

Dalam bentuknya yang masih embrio, *Kin Police* juga mulai dikenal di Indonesia berupa Hansip, Siskamling dan Satpam. Akan tetapi Polri sendiri mempunyai sejarah sebagai polisi bentukan penguasa, yang berlanjut kepada kedudukan Polri sebagai unsur ABRI. Sejarah yang kurang menguntungkan ini telah menyebabkan pembentukan watak perwira dan anggota Polri yang kurang kondusif dengan kondisi demokrasi yang saat ini harus dipertahankan, sementara masyarakat sendiri masih bercitra negatif pada Polri (memihak atau mementingkan diri sendiri). Salah satu bentuk penyimpangan perilaku Polri yang sudah terlanjur menjadi citra negatifnya adalah penggunaan kekerasan sebagai perwujudan *power*.

Kepolisian memang harus punya *power* untuk dapat

menegakkan hukum dan mempertahankan konformitas, akan tetapi *power* bisa berbentuk (1) manipulatif (digunakan untuk menguasai orang lain), (2) kompetitif (melawan orang lain) atau (3) integratif (digunakan bersama orang lain) (Yarmey, 1990: 144). Jenis yang ketiga inilah yang seharusnya digunakan oleh Polri agar ia bersama dengan masyarakat dapat mempertahankan situasi demokratis dalam masyarakat pada titik-titik yang optimal.

KEPUSTAKAAN

- Fromm, E. (2000) *Akar Kekerasan: Analisis Sosio-psikologis atas Watak Manusia*, (Judul asli: *The Anatomy of Human Destructiveness*, penerjemah: Imam Muttaqlen), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kunarto (1997) *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta, Cipta Manunggal
- Sarwono, S.W. (1999) *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sidel, J.T. (1999) *Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines*, Honolulu: East-West Center.
- Yarmey, A. D. (1990) *Understanding Police and Police Work: Psychosocial Issues*, New York: New York University Press.